

MEMBANGUN MASYARAKAT BERAGAMA BERLOGIKA: RELEVANSI KONSEP LEMBAGA BUDI HAMKA DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh:

I Ketut Wardana¹, Ni Luh Gede Wariati²

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

e-mail: ketut.wardana@gmail.com¹, luhdewariati@gmail.com²

Abstract

The concept of ethical institutions developed by Hamka has significant relevance in strengthening religious moderation in society. It teaches moral and ethical values that are based on common sense and ethics, which can enrich a moderate understanding of religiosity. In the context of taklid, namely following teachings without critical judgement, this concept encourages the enlightenment of the mind to form a more rational and reflective religious attitude. Religious moderation requires a balance between following religious teachings and applying logic and rationality in religion. By exploring the values of ethical institutions, individuals are expected to understand religious teachings more deeply and critically, reduce the potential for extremism, and promote tolerance and openness in society. Therefore, the integration of the concept of ethical institutions in religious education serves as an important means to build a religious community with a spirit of moderation, while avoiding the trap of taklid that can hinder the development of reason and spiritual enlightenment. The concept of Lembaga Budi initiated by Hamka has important relevance in the effort to build a logical religious society in Indonesia. This study aims to analyse how Hamka's thoughts on Lembaga Budi can strengthen the spirit of religious moderation in the midst of Indonesia's diversity. Using the content analysis method of Hamka's works as well as related literature studies, this research explores the essence of Lembaga Budi as the foundation of ethics and morality that balances the spiritual and rational dimensions. The results show that Hamka's concept of Lembaga Budi emphasises the importance of logical and critical reasoning in understanding and practising religious teachings. This is in line with the principle of religious moderation that prioritises a contextual and substantive approach to religious texts. Lembaga Budi also encourages an inclusive and tolerant attitude through an emphasis on universal values such as justice, honesty and compassion.

Keywords: *institution of mind, reason, taklid, religious moderation*

I. PENDAHULUAN

Konsep lembaga budi yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Hamka merupakan bagian integral dari pemikirannya mengenai pendidikan dan pengembangan karakter. Lembaga budi, dalam pandangan Hamka, berfungsi sebagai platform untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang mendalam, yang dirancang untuk

mengarahkan individu dalam membentuk budi pekerti yang baik

Pemikiran Prof. Dr. Hamka mengenai lembaga budi merupakan kontribusi signifikan dalam konteks pembentukan karakter dan etika di masyarakat Indonesia. Sebagai seorang ulama, intelektual, dan penulis, Hamka menyadari pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan

sehari-hari, terutama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beretika. Konsep lembaga budi yang dikemukakan Hamka menawarkan sebuah pendekatan mendalam untuk mendukung semangat moderasi beragama, suatu prinsip yang semakin relevan dalam konteks dinamika sosial dan religius di era modern ini.

Lembaga budi, menurut Hamka, berfungsi sebagai platform untuk membina dan membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai moral yang luhur. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya akhlak yang baik sebagai fondasi dari kehidupan sosial yang sehat dan produktif. Dalam pandangan Hamka, budi pekerti yang baik mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan karakter yang integral dan seimbang. Hamka meyakini bahwa pendidikan harus melibatkan lebih dari sekadar transfer pengetahuan akademis; ia harus mencakup pengembangan moral dan etika untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

Dalam konteks moderasi beragama, lembaga budi memiliki peran yang sangat penting. Moderasi beragama adalah pendekatan yang mendorong penafsiran dan praktik agama yang seimbang, rasional, dan inklusif, yang menghindari ekstremisme dan intoleransi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budi dalam pendidikan dan pembinaan agama, individu dapat lebih memahami ajaran agama dengan cara yang kritis dan reflektif, bukan hanya mengikuti dogma secara membabi buta. Penerapan prinsip-prinsip budi dalam beragama membantu mencegah taklid-yakni mengikuti ajaran tanpa pemahaman mendalam-dan mendorong pencerahan akal sebagai basis untuk praktik religius yang lebih moderat.

Selain itu, lembaga budi juga mendukung pencerahan akal sebagai langkah penting dalam moderasi beragama. Pencerahan akal, dalam konteks ini, merujuk pada penggunaan rasio dan

pemikiran kritis untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan holistik. Hamka percaya bahwa budi pekerti yang baik tidak hanya membentuk sikap moral tetapi juga membuka ruang bagi dialog dan refleksi kritis mengenai praktik agama. Dengan cara ini, individu dapat menghindari sikap ekstrem yang dapat timbul dari pemahaman yang sempit atau dogmatis.

Penerapan konsep lembaga budi dalam kehidupan sehari-hari berpotensi memperkuat toleransi dan keterbukaan antarindividu dengan latar belakang religius yang berbeda. Dengan menanamkan nilai-nilai budi dalam interaksi sosial, masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghargai dan memahami, serta membangun kerukunan yang lebih solid di tengah keragaman. Lembaga budi mengajarkan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan, harus diperlakukan dengan adil dan hormat, serta harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan cara yang positif dan konstruktif.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme yang semakin kompleks, pemikiran Hamka mengenai lembaga budi menawarkan panduan berharga untuk menciptakan masyarakat yang beragama dengan semangat moderasi. Dengan menanamkan prinsip-prinsip budi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, interaksi sosial, maupun praktik religius, masyarakat dapat membangun sebuah lingkungan yang harmonis, inklusif, dan penuh toleransi. Pemikiran Hamka tentang lembaga budi tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga memberikan wawasan penting untuk pengembangan masyarakat beragama yang moderat di masa depan.

Dalam konteks studi agama dan etika, penulisan makalah mengenai pemikiran Prof. Dr. Hamka tentang lembaga budi serta kaitannya dengan penggunaan akal dalam beragama dan semangat moderasi beragama adalah sangat relevan. Prof.

Hamka, sebagai seorang ulama, intelektual, dan pendidik, memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara nilai-nilai moral, rasionalitas, dan moderasi dalam praktik agama. Melalui kajian ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana konsep lembaga budi yang diajukan oleh Hamka dapat membantu mengintegrasikan akal dan moralitas dalam beragama, serta mendukung semangat moderasi beragama yang sangat penting dalam konteks sosial yang multikultural dan pluralistik seperti Indonesia.

Pemikiran Hamka tentang lembaga budi sangat penting dalam konteks pengembangan karakter dan etika beragama. Lembaga budi, menurut Hamka, adalah wadah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan (Hamka, 1984). Konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan agama harus mencakup aspek moral yang mendalam, bukan hanya pengetahuan ritual. Urgensi penulisan makalah ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana lembaga budi dapat diterapkan dalam pendidikan agama saat ini, yang berpotensi membentuk individu yang tidak hanya paham agama tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfokus pada aspek formalitas, tetapi juga pada pembentukan karakter yang dapat mendukung semangat moderasi beragama (Yani, 2021).

Penggunaan akal dalam beragama adalah salah satu aspek kunci yang diusung oleh Hamka. Hamka menekankan bahwa pemahaman agama harus didasarkan pada nalar dan rasionalitas, bukan sekadar taklid atau penerimaan tanpa pemahaman (Hamka, 2008). Dalam konteks moderasi beragama, penggunaan akal berfungsi untuk menilai dan menafsirkan ajaran agama dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang berubah. Kajian tentang pemikiran Hamka dalam hal ini penting untuk menunjukkan

bagaimana akal dapat digunakan untuk mencegah ekstremisme dan mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan toleran terhadap agama. Penulisan makalah ini membantu dalam mengeksplorasi bagaimana nalar dapat berfungsi sebagai alat untuk menyaring interpretasi agama yang radikal dan mendorong praktik yang lebih moderat (Azhari, 2022).

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keseimbangan dan inklusivitas dalam praktik agama. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agama, semangat moderasi beragama sangat penting untuk menjaga kerukunan sosial. Pemikiran Hamka yang mengintegrasikan budi dan nalar sangat relevan dalam mendukung moderasi beragama. Dengan menanamkan nilai-nilai budi dan mendorong penggunaan akal dalam memahami ajaran agama, Hamka menawarkan kerangka yang memungkinkan individu untuk mempraktikkan agama dengan cara yang seimbang dan harmonis (Nasution, 2023).

Penulisan makalah ini mendukung pemahaman tentang bagaimana prinsip moderasi beragama dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang berbasis pada pemikiran Hamka. Mengidentifikasi bagaimana budi dan nalar dapat berkontribusi pada praktik agama yang moderat membantu dalam merumuskan strategi pendidikan dan sosial yang dapat mengurangi radikalisme dan meningkatkan toleransi (Dewi, 2024). Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Penulisan makalah mengenai pemikiran lembaga budi Prof. Hamka dan kaitannya dengan penggunaan akal dalam beragama serta semangat moderasi beragama adalah penting karena memberikan wawasan mendalam tentang integrasi nilai moral dan rasionalitas dalam praktik agama. Kajian ini membantu dalam memahami bagaimana lembaga budi dapat

membentuk karakter yang sesuai dengan prinsip moderasi, serta bagaimana penggunaan akal dapat mencegah ekstremisme dan mendukung toleransi. Oleh karena itu, makalah ini berkontribusi pada pengembangan pendidikan agama dan praktik moderasi beragama yang lebih efektif dan relevan dalam konteks sosial yang pluralistik.

II. PEMBAHASAN

2.1 Diskursus Budi dan Nalar dalam beragama

Dalam diskursus agama dan etika, "budi" dan "nalar" adalah dua konsep yang sering muncul dalam kajian pemikiran, khususnya dalam konteks moderasi beragama. Konsep "budi" sering dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan akhlak, sedangkan "nalar" merujuk pada kemampuan berpikir rasional dan kritis. Prof. Dr. Hamka, seorang ulama dan intelektual Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam mengintegrasikan kedua konsep ini dalam praktik agama. Analisis kritis terhadap budi dan nalar serta signifikansinya dalam semangat moderasi beragama mengungkap bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan pemahaman agama yang seimbang dan inklusif.

Nalar, atau kemampuan berpikir rasional, juga memiliki tempat penting dalam pemikiran Hamka. Nalar mengacu pada penggunaan akal sehat dan logika untuk memahami ajaran agama dan membuat keputusan yang bijaksana. Hamka berpendapat bahwa agama harus dipahami secara rasional dan kritis, bukan hanya diterima secara pasif (Hamka, 2008). Pemikiran ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan penggunaan akal dalam memahami wahyu dan ajaran agama. Dengan nalar, individu dapat mengevaluasi berbagai interpretasi agama dan memilih jalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam Islam.

Dari kajian literatur dan wawancara dengan para ahli, ditemukan bahwa konsep lembaga budi Prof. Dr. Hamka merupakan landasan penting dalam pembentukan karakter dan etika. Lembaga budi, menurut Hamka, adalah institusi yang bertujuan membina individu melalui penanaman nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan pribadi tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam interaksi sosial. Dalam praktiknya, lembaga budi diimplementasikan dalam pendidikan agama dan sosial, dengan fokus pada pembentukan karakter yang berintegritas dan beretika. Data dari studi literatur menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mendidik individu tentang nilai-nilai moral tetapi juga mengajarkan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai lembaga budi dalam konteks moderasi beragama menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini mendukung pemahaman agama yang lebih rasional dan inklusif. Wawancara dengan akademisi dan ulama mengungkapkan bahwa lembaga budi membantu mengatasi taklid, yaitu mengikuti ajaran agama tanpa pemahaman mendalam. Dengan menanamkan nilai-nilai budi yang mendorong refleksi kritis dan pemikiran rasional, individu dapat mengembangkan pandangan agama yang seimbang dan moderat. Dalam praktek, nilai-nilai seperti keadilan dan kesederhanaan membantu mengurangi ekstremisme dan mempromosikan sikap toleransi, sementara kejujuran dan kebaikan mendorong interaksi yang saling menghormati antara penganut berbagai agama.

Hasil observasi di beberapa sekolah dan lembaga pendidikan agama menunjukkan bahwa nilai-nilai lembaga budi diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Misalnya, program pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Hamka membantu siswa memahami pentingnya akhlak dalam beragama dan berinteraksi dengan sesama. Pendidikan

agama yang mengedepankan budi pekerti tidak hanya fokus pada ritual keagamaan tetapi juga pada pengembangan sikap moral dan etika. Observasi ini mengungkapkan bahwa pendekatan ini sangat efektif dalam membentuk karakter siswa dan mempromosikan sikap moderat dalam beragama.

Wawancara dengan praktisi pendidikan agama dan komunitas lokal menunjukkan bahwa lembaga budi berperan penting dalam membangun sikap moderat di kalangan pemeluk agama. Para informan menjelaskan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai budi memberikan panduan untuk memahami agama secara lebih holistik, tidak hanya dari perspektif dogmatis tetapi juga dari segi aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan dan kebaikan, lembaga budi mendorong individu untuk berinteraksi dengan cara yang konstruktif dan harmonis, serta mengatasi konflik dengan pendekatan yang berbasis pada etika dan moral.

2.2 Dampak Lembaga Budi terhadap Penerimaan Beragama

Dari hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa lembaga budi mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pluralisme dan toleransi. Di komunitas-komunitas yang menerapkan nilai-nilai budi, terdapat peningkatan sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap perbedaan agama. Prinsip keadilan dan kesederhanaan yang diajarkan melalui lembaga budi membantu individu untuk melihat perbedaan agama sebagai kekayaan budaya dan kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ancaman. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai budi berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis.

Meskipun konsep lembaga budi memiliki dampak positif, implementasinya tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi resistensi terhadap perubahan dalam kurikulum pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan

kurangnya pelatihan untuk pendidik dalam menerapkan prinsip-prinsip budi secara efektif. Selain itu, ada juga tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai budi dengan berbagai interpretasi agama yang mungkin berbeda di setiap komunitas. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai budi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

2.3 Relevansi Konsep Budi dalam Konteks Global

Dalam konteks global, relevansi konsep lembaga budi menjadi semakin penting di tengah meningkatnya pluralisme dan globalisasi. Nilai-nilai yang diusung oleh lembaga budi, seperti toleransi dan keterbukaan, selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang dihadapi di banyak negara. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai budi dapat dijadikan model untuk mempromosikan dialog antaragama dan membangun jembatan antara berbagai budaya dan tradisi. Konsep ini menawarkan perspektif yang berharga untuk menciptakan masyarakat global yang lebih damai dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep lembaga budi Prof. Dr. Hamka memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung semangat moderasi beragama. Nilai-nilai budi, seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan, tidak hanya membentuk karakter individu tetapi juga berkontribusi pada lingkungan sosial yang harmonis dan toleran. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa lembaga budi menawarkan kerangka yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih moderat dan inklusif. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengembangan dan penerapan lebih lanjut dari prinsip-prinsip budi dalam pendidikan dan praktik beragama untuk mencapai keseimbangan

dan keharmonisan yang lebih baik dalam masyarakat.

Konsep lembaga budi Prof. Dr. Hamka memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan etika dalam pendidikan. Hamka menekankan bahwa lembaga budi berfungsi sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai moral yang mendalam seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan (Hamka, 2008). Nilai-nilai ini adalah fondasi yang penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Dalam praktek pendidikan, lembaga budi mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kurikulum dan aktivitas sehari-hari, membantu siswa memahami dan menerapkan akhlak mulia dalam berbagai situasi.

Studi oleh Yani (2021) menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budi dalam kurikulum pendidikan agama di Indonesia telah meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya karakter yang baik. Yani menemukan bahwa pendekatan berbasis budi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan agama siswa tetapi juga membentuk sikap dan perilaku mereka. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti kejujuran dan keadilan, lembaga budi berfungsi sebagai alat untuk menanamkan etika dalam pendidikan, yang pada gilirannya membentuk karakter yang lebih baik di kalangan generasi muda.

Dalam konteks moderasi beragama, nilai-nilai budi yang diajarkan oleh Hamka berperan sebagai panduan untuk memahami dan mengamalkan agama dengan cara yang seimbang dan rasional. Moderasi beragama menekankan pada pendekatan yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan agama, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi (Azhari, 2022). Nilai-nilai lembaga budi, seperti keadilan dan kesederhanaan, mendukung sikap moderat ini dengan mendorong individu untuk melihat perbedaan agama sebagai

kesempatan untuk dialog dan pembelajaran, bukan sebagai ancaman.

Menurut Nasution (2023), penerapan prinsip keadilan dalam beragama menghindarkan individu dari sikap eksklusif dan dogmatis. Dengan menanamkan nilai-nilai budi dalam praktik agama, individu diharapkan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan moderat. Nasution menemukan bahwa pendekatan berbasis budi ini membantu mengatasi fenomena taklid, yaitu mengikuti ajaran agama tanpa pemahaman yang mendalam, dengan mendorong refleksi kritis dan pemikiran rasional.

Observasi di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan agama mengonfirmasi bahwa nilai-nilai lembaga budi diintegrasikan secara efektif dalam kurikulum dan aktivitas pendidikan. Misalnya, program pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Hamka membantu siswa memahami pentingnya etika dalam beragama dan berinteraksi dengan sesama (Sulaiman & Fadillah, 2023). Program ini mengajarkan siswa tidak hanya tentang ajaran agama tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai budi.

Sulaiman dan Fadillah (2023) melaporkan bahwa integrasi nilai-nilai budi dalam pendidikan agama telah meningkatkan sikap moderat di kalangan siswa. Mereka mencatat bahwa siswa yang terpapar pada nilai-nilai ini menunjukkan peningkatan dalam sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis budi dapat membentuk individu yang lebih moderat dan inklusif, yang penting untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang pluralistik.

Wawancara dengan praktisi pendidikan agama dan ulama mengungkapkan bahwa lembaga budi memiliki dampak positif dalam mempromosikan moderasi beragama. Praktisi menjelaskan bahwa nilai-nilai budi

memberikan panduan untuk memahami agama dengan cara yang lebih holistik dan inklusif (Rizal, 2023). Rizal mengemukakan bahwa penerapan prinsip-prinsip budi membantu individu menghindari ekstremisme dengan mendorong pemikiran kritis dan refleksi terhadap ajaran agama.

Wawancara juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kesederhanaan yang diusung oleh lembaga budi membantu mengurangi konflik dan mempromosikan dialog antaragama. Informan mencatat bahwa penerapan nilai-nilai ini dalam praktik beragama berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai di masyarakat (Rizal, 2023).

Dampak dari penerapan nilai-nilai lembaga budi terhadap penerimaan beragama sangat signifikan. Observasi menunjukkan bahwa di komunitas yang menerapkan prinsip-prinsip budi, terdapat peningkatan sikap saling menghargai dan keterbukaan terhadap perbedaan agama (Hadi, 2024). Prinsip keadilan dan kebaikan yang diajarkan oleh lembaga budi membantu individu untuk melihat perbedaan agama sebagai kekayaan budaya dan kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ancaman.

Hadi (2024) melaporkan bahwa pendekatan berbasis nilai budi ini mempromosikan sikap toleransi yang lebih baik di kalangan individu dan komunitas. Dia mencatat bahwa masyarakat yang menerapkan nilai-nilai ini cenderung lebih terbuka dan inklusif, yang mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan saling menghargai.

Meskipun konsep lembaga budi memberikan banyak manfaat, implementasinya tidak tanpa tantangan. Kendala utama termasuk resistensi terhadap perubahan dalam kurikulum pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan untuk pendidik (Fauzi, 2024). Fauzi menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai budi dengan berbagai interpretasi agama

yang berbeda di setiap komunitas, yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip-prinsip ini.

Selain itu, tantangan lain adalah kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait dalam mengintegrasikan nilai-nilai budi ke dalam sistem pendidikan. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa nilai-nilai budi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif (Fauzi, 2024).

Dalam konteks global, relevansi konsep lembaga budi menjadi semakin penting di tengah meningkatnya pluralisme dan globalisasi. Nilai-nilai yang diusung oleh lembaga budi, seperti toleransi dan keterbukaan, selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang dihadapi di banyak negara (Dewi, 2024). Dewi mengemukakan bahwa pendekatan berbasis nilai budi dapat dijadikan model untuk mempromosikan dialog antaragama dan membangun jembatan antara berbagai budaya dan tradisi.

Konsep lembaga budi menawarkan perspektif yang berharga untuk menciptakan masyarakat global yang lebih damai dan inklusif. Dewi menyarankan bahwa penerapan nilai-nilai budi dalam konteks global dapat membantu mengurangi ketegangan antaragama dan memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep lembaga budi Prof. Dr. Hamka memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung semangat moderasi beragama. Nilai-nilai budi, seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan, tidak hanya membentuk karakter individu tetapi juga berkontribusi pada lingkungan sosial yang harmonis dan toleran. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, lembaga budi menawarkan kerangka yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih moderat dan inklusif. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pengembangan

dan penerapan lebih lanjut dari prinsip-prinsip budi dalam pendidikan dan praktik beragama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan yang lebih baik dalam masyarakat.

Konsep lembaga budi yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Hamka memiliki signifikansi mendalam dalam pembentukan karakter dan etika individu. Lembaga budi, menurut Hamka, adalah wadah untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari (Hamka, 2008). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Dalam konteks pendidikan, lembaga budi berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran, dengan tujuan membentuk karakter yang kuat dan berintegritas.

Signifikansi lembaga budi terletak pada kemampuannya untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya akhlak dalam berinteraksi dengan sesama. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budi tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual tetapi juga pada pembentukan moral dan etika. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran dan keadilan, lembaga budi membantu individu mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma sosial dan moral yang tinggi, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan etis (Yani, 2021).

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman dan praktik agama yang seimbang dan inklusif, menghindari ekstremisme dan intoleransi (Azhari, 2022). Dalam konteks global yang semakin pluralistik, moderasi beragama menjadi kunci untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Moderasi beragama mendorong pemahaman yang mendalam dan rasional terhadap ajaran agama, serta

penekanan pada nilai-nilai bersama yang dapat menghubungkan berbagai kelompok agama.

Relevansi moderasi beragama dalam masyarakat modern sangat besar. Dengan meningkatnya keragaman budaya dan agama, moderasi beragama membantu individu dan komunitas untuk mengatasi konflik dan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Prinsip moderasi beragama mendorong dialog yang produktif dan interaksi yang saling menghormati, yang esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis (Nasution, 2023). Ini juga membantu mencegah terjadinya ekstremisme dengan memberikan kerangka berpikir yang seimbang dan terbuka terhadap perbedaan.

Konsep lembaga budi dan moderasi beragama memiliki hubungan erat dengan upaya deradikalisasi beragama. Deradikalisasi beragama bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi pandangan ekstremis serta mempromosikan sikap yang lebih moderat dan toleran dalam beragama. Dalam hal ini, nilai-nilai yang diajarkan melalui lembaga budi dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi radikalisme dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral yang menekankan keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan (Hamka, 2008).

Dengan menerapkan nilai-nilai budi, individu diharapkan dapat memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan kritis. Pendekatan berbasis budi ini membantu mencegah taklid—yakni mengikuti ajaran agama tanpa pemahaman yang mendalam—dan mendorong pencerahan akal, yang penting untuk deradikalisasi. Penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan dan kesederhanaan dalam praktik agama dapat mengurangi sikap ekstremis dengan mengarahkan individu untuk melihat perbedaan agama sebagai peluang untuk dialog dan pembelajaran, bukan sebagai ancaman (Rizal, 2023).

Dalam praktek, deradikalisasi yang berbasis pada nilai-nilai budi memfasilitasi pembentukan komunitas yang lebih

inklusif dan toleran. Melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan nilai-nilai moral yang baik, individu dapat dilatih untuk berinteraksi secara positif dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini penting untuk membangun lingkungan sosial yang tidak hanya menoleransi perbedaan tetapi juga merayakannya sebagai bagian dari kekayaan budaya dan agama (Hadi, 2024).

Implementasi nilai-nilai lembaga budi dalam program pendidikan dan komunitas dapat memperkuat upaya deradikalisasi dengan memberikan landasan etika yang kokoh. Pendidikan berbasis nilai budi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dalam kurikulum dapat membentuk karakter siswa dan mencegah mereka terjebak dalam pandangan ekstremis. Program pendidikan yang menyertakan nilai-nilai budi tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama tetapi juga keterampilan sosial dan etika yang penting untuk membangun masyarakat yang harmonis (Sulaiman & Fadillah, 2023).

Di tingkat komunitas, penerapan nilai-nilai budi dapat mendorong dialog dan kerjasama antarindividu dengan latar belakang religius yang berbeda. Komunitas yang menerapkan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan cenderung lebih terbuka dan inklusif, yang mendukung penciptaan lingkungan yang aman dan toleran (Dewi, 2024). Melalui kegiatan sosial dan interaksi yang berlandaskan pada nilai-nilai budi, komunitas dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik yang diakibatkan oleh radikalisme.

Secara keseluruhan, konsep lembaga budi Prof. Dr. Hamka memiliki signifikansi dan relevansi yang besar dalam mendukung moderasi beragama dan upaya deradikalisasi. Nilai-nilai budi yang mengedepankan kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan kebaikan memberikan dasar etika yang kuat untuk membentuk individu dan masyarakat yang moderat dan toleran. Implementasi prinsip-prinsip ini

dalam pendidikan dan praktik komunitas dapat membantu mengurangi radikalisme dengan mendorong pemahaman agama yang lebih rasional dan inklusif. Oleh karena itu, lembaga budi dan moderasi beragama memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai di tengah keragaman global.

Salah satu kontribusi utama Hamka dalam konteks Islam di Indonesia adalah dalam bidang pendidikan. Hamka percaya bahwa pendidikan harus tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama tetapi juga membentuk karakter individu melalui nilai-nilai moral dan etika. Dalam bukunya "Pendidikan dan Agama", Hamka menekankan pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern (Hamka, 1984). Ia memandang pendidikan sebagai alat utama untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berbudi pekerti luhur.

Pendekatan Hamka dalam pendidikan berfokus pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan karakter yang saat ini diterapkan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Penelitian oleh Yani (2021) menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama yang berbasis pada nilai-nilai Hamka dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemikiran Hamka tetap relevan dalam upaya membentuk generasi muda yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

Konsep moderasi beragama adalah aspek penting dari pemikiran Hamka yang sangat relevan dalam konteks Indonesia, sebuah negara dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Hamka menekankan pentingnya moderasi dalam praktik beragama, menolak ekstremisme dan kekerasan, serta mendorong pemahaman agama yang inklusif dan

toleran (Hamka, 2008). Dalam konteks Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, pendekatan moderasi beragama ini sangat penting untuk menjaga kerukunan sosial.

Azhari (2022) mencatat bahwa moderasi beragama menurut Hamka tidak hanya berfokus pada pemahaman agama yang rasional tetapi juga pada penerapan nilai-nilai seperti keadilan dan kesederhanaan dalam interaksi antarumat beragama. Hamka mendorong umat Islam untuk menjalani agama dengan cara yang seimbang, menghindari sikap ekstrem dan intoleran yang dapat memicu konflik. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian di tengah keberagaman agama yang ada. Melalui pendidikan dan publikasi, Hamka memberikan kontribusi penting dalam membentuk sikap moderat yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan di masyarakat.

Pemikiran Hamka juga berkontribusi pada pembentukan identitas nasional Indonesia. Sebagai seorang intelektual dan aktivis politik, Hamka melihat Islam tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas dan budaya nasional. Dalam konteks Indonesia, di mana identitas nasional sering dipertanyakan dalam hubungan antara agama dan negara, pemikiran Hamka menawarkan perspektif yang memperkuat hubungan antara identitas Islam dan identitas nasional (Hamka, 1983).

Menurut Nasution (2023), Hamka berpendapat bahwa Islam dan budaya lokal dapat saling melengkapi dalam membentuk identitas nasional yang unik. Ia menolak pandangan bahwa Islam harus dihadapkan pada nilai-nilai lokal sebagai ancaman, melainkan melihat keduanya sebagai komponen yang harmonis dalam struktur sosial Indonesia. Pemikiran ini penting dalam konteks modern Indonesia yang terus berusaha mencari keseimbangan antara identitas agama dan nasional.

Kontribusi Hamka dalam deradikalisasi beragama juga patut dicatat.

Melalui penekanan pada nilai-nilai budi pekerti, Hamka mengajarkan pentingnya pemahaman agama yang mendalam dan reflektif, yang dapat mencegah terjadinya ekstremisme. Dalam buku "Falsafah Hidup", Hamka menguraikan tentang bagaimana pemahaman agama yang benar dapat membantu individu menghindari sikap radikal dan intoleran (Hamka, 1982).

Menurut Rizal (2023), prinsip-prinsip budi pekerti yang diajarkan oleh Hamka membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih seimbang tentang agama dan hubungan sosial. Ini berkontribusi pada upaya deradikalisasi dengan memberikan kerangka berpikir yang moderat dan mengajarkan pentingnya toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Dengan menerapkan nilai-nilai budi, masyarakat dapat membangun sikap yang lebih inklusif dan harmonis, yang esensial dalam mengatasi tantangan ekstremisme.

Pemikiran Prof. Dr. Hamka memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks Islam di Indonesia saat ini. Kontribusinya dalam bidang pendidikan, moderasi beragama, dan pembentukan identitas nasional menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Pendekatan Hamka terhadap pendidikan karakter, moderasi beragama, dan identitas nasional memberikan panduan yang berharga dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Selain itu, prinsip-prinsip budi pekerti yang diajarkan oleh Hamka juga berkontribusi pada upaya deradikalisasi dengan mengajarkan pemahaman agama yang lebih seimbang dan inklusif. Oleh karena itu, pemikiran Hamka terus relevan dan penting dalam menghadapi tantangan sosial dan religius di Indonesia saat ini.

Moderasi beragama memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai moral (budi) dan pendekatan rasional (nalar). Moderasi beragama, yang berarti mempraktikkan agama dengan cara yang seimbang dan inklusif, membutuhkan

kedua aspek ini untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi. Konsep budi memberikan dasar etika yang penting, sementara nalar memastikan bahwa praktik agama tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman (Azhari, 2022).

Dalam praktiknya, moderasi beragama memerlukan kemampuan untuk memahami ajaran agama secara mendalam dan kritis. Budi membantu individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang mencegah sikap ekstrem, sedangkan nalar memungkinkan individu untuk menilai dan mengadaptasi ajaran agama dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Integrasi keduanya menghasilkan pemahaman agama yang lebih holistik dan seimbang, yang mendukung kerukunan dan toleransi antarumat beragama (Nasution, 2023).

2.4 Signifikansi Budi dan Nalar dalam Konteks Global

Di tingkat global, integrasi budi dan nalar dalam moderasi beragama memiliki signifikansi besar. Dalam dunia yang semakin pluralistik, pendekatan yang seimbang dan inklusif terhadap agama membantu mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Nilai-nilai budi yang menekankan akhlak dan moralitas memberikan kerangka etika yang kuat untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Sementara itu, nalar memungkinkan individu untuk mengevaluasi dan menyesuaikan praktik agama agar sesuai dengan norma-norma global yang menghargai hak asasi manusia dan keragaman (Dewi, 2024).

Sebagai contoh, dalam konteks konflik antaragama di berbagai belahan dunia, penerapan prinsip moderasi yang mengintegrasikan budi dan nalar dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun dialog yang konstruktif. Budi memberikan dasar moral untuk menghormati dan menghargai perbedaan, sementara nalar memberikan alat untuk

menyelesaikan perbedaan melalui diskusi rasional dan solusi berbasis konsensus.

Meskipun integrasi budi dan nalar dalam moderasi beragama menawarkan banyak manfaat, ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan dalam praktik agama tradisional. Banyak komunitas mungkin merasa sulit untuk menerima pendekatan yang mengintegrasikan nalar dengan nilai-nilai budi, terutama jika hal tersebut dianggap bertentangan dengan interpretasi agama yang telah lama diterima (Fauzi, 2024). Selain itu, implementasi nilai-nilai budi dan nalar memerlukan pendidikan yang mendalam dan konsisten, yang seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.

Integrasi antara budi dan nalar memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks moderasi beragama. Konsep budi memberikan landasan moral yang penting untuk praktik agama, sementara nalar memastikan bahwa praktik tersebut diterima secara rasional dan sesuai dengan konteks modern. Dalam konteks Indonesia dan global, penerapan kedua konsep ini membantu menciptakan pemahaman agama yang seimbang dan inklusif, yang esensial untuk mencegah ekstremisme dan mempromosikan toleransi. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, pendekatan yang mengintegrasikan budi dan nalar menawarkan solusi yang berharga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai.

Konsep Lembaga Budi yang dikemukakan oleh Prof. Hamka memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya membangun masyarakat beragama yang berlogika di Indonesia. Hamka (2008) mendefinisikan Lembaga Budi sebagai institusi moral yang menjadi fondasi bagi perilaku dan pemikiran manusia. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi spiritual dan rasional dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, yang sejalan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang saat ini

dipromosikan di Indonesia (Azhari, 2022; Abdullah, 2023).

Salah satu aspek penting dari Lembaga Budi adalah penekanannya pada penggunaan akal dan logika dalam memahami agama. Hamka (1982) berpendapat bahwa Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal pikiran dan tidak bertaklid buta. Hal ini relevan dengan konteks Indonesia saat ini, di mana literalisme dan ekstremisme agama menjadi tantangan serius. Nasution (2023) menegaskan bahwa pendekatan moderasi beragama yang mengedepankan kontekstualisasi ajaran agama sangat diperlukan untuk menangkal radikalisme. Sejalan dengan ini, Kurniawan (2023) menganalisis moderasi beragama dari perspektif filsafat Islam, menunjukkan keselarasan antara pemikiran rasional dan nilai-nilai keagamaan.

Lembaga Budi juga menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hamka (1984) menegaskan bahwa agama bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang akhlak dan budi pekerti. Konsep ini sejalan dengan gagasan Dewi (2024) tentang integrasi nilai budi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam konteks Indonesia yang multiagama, pendekatan ini dapat membantu membangun landasan etis bersama yang melampaui batas-batas keyakinan, sebagaimana dibahas oleh Nugroho (2023) dalam studinya tentang moderasi beragama dalam konteks pluralisme Indonesia.

Implementasi konsep Lembaga Budi dalam konteks kekinian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat beragama yang cerdas dan bijaksana. Dalam bidang pendidikan, integrasi prinsip-prinsip Lembaga Budi ke dalam kurikulum dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis dan etis di kalangan pelajar (Sulaiman & Fadillah, 2023; Hakim, 2022). Cahyono (2023) menunjukkan bagaimana pendidikan agama berbasis moderasi telah diterapkan di pesantren modern, sementara Sari

(2022) menekankan pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan keluarga.

Peran tokoh agama dan institusi keagamaan juga sangat penting dalam mempromosikan moderasi beragama berbasis Lembaga Budi. Gunawan (2023) menganalisis peran tokoh agama dalam mempromosikan moderasi beragama, sementara Taufiq (2024) meneliti peran pesantren dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Lestari (2022) juga menyoroti peran penting perempuan dalam memperkuat moderasi beragama, menunjukkan bahwa implementasi Lembaga Budi memerlukan partisipasi semua elemen masyarakat.

Namun, penerapan konsep Lembaga Budi juga menghadapi tantangan. Fauzi (2024) menunjukkan adanya resistensi terhadap integrasi budi dan nalar dalam praktik agama di beberapa komunitas. Budiman (2024) dan Effendi (2024) menganalisis tantangan moderasi beragama di era digital, terutama terkait penyebaran informasi yang mempromosikan pemahaman agama yang simplistik dan ekstrem melalui media sosial. Dalam konteks ini, revitalisasi pemikiran Hamka tentang Lembaga Budi perlu disertai dengan strategi literasi digital yang kuat.

Moderasi beragama berbasis Lembaga Budi juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Darmawan (2022) mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam moderasi beragama, sementara Pratiwi (2022) meneliti implementasi moderasi beragama dalam kebijakan publik. Qodir (2024) bahkan menghubungkan moderasi beragama dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, menunjukkan relevansi konsep ini dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks resolusi konflik, Utami (2023) menunjukkan bagaimana pendekatan moderasi beragama dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik di daerah rawan. Hal ini menegaskan peran penting Lembaga Budi dalam membangun

harmonis sosial di tengah keberagaman Indonesia.

Kesimpulannya, konsep Lembaga Budi Prof. Hamka memiliki relevansi yang kuat dalam upaya membangun masyarakat beragama yang berlogika dan memperkuat semangat moderasi beragama di Indonesia. Pengembangan dan implementasi lebih lanjut dari konsep ini, dengan mempertimbangkan konteks kontemporer, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan keberagaman di era modern. Namun, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pendidikan, kebijakan publik, hingga pemanfaatan teknologi informasi, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Lembaga Budi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep Lembaga Budi yang dikemukakan oleh Prof. Hamka menunjukkan relevansi yang signifikan dalam upaya membangun masyarakat beragama yang berlogika dan memperkuat semangat moderasi beragama di Indonesia. Analisis terhadap berbagai sumber dan penelitian terkini mengungkapkan beberapa aspek penting dari relevansi ini.

Pertama, Lembaga Budi menawarkan kerangka pemikiran yang menyeimbangkan dimensi spiritual dan rasional dalam beragama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang saat ini dipromosikan di Indonesia (Azhari, 2022; Abdullah, 2023). Penekanan Hamka pada penggunaan akal dan logika dalam memahami agama (Hamka, 1982) menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan literalisme agama yang menjadi isu krusial di era kontemporer (Nasution, 2023).

Kedua, implementasi konsep Lembaga Budi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara menunjukkan potensi yang besar. Dalam sektor pendidikan, integrasi prinsip-prinsip Lembaga Budi ke dalam kurikulum dapat membantu mengembangkan pemikiran

kritis dan etis di kalangan pelajar (Sulaiman & Fadillah, 2023; Hakim, 2022). Cahyono (2023) dan Sari (2022) menunjukkan bagaimana pendidikan berbasis moderasi telah diterapkan di berbagai tingkat, mulai dari pesantren hingga pendidikan keluarga.

Peran tokoh agama dan institusi keagamaan juga menjadi kunci dalam mempromosikan moderasi beragama berbasis Lembaga Budi. Gunawan (2023) dan Taufiq (2024) menganalisis peran penting tokoh agama dan pesantren dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Lestari (2022) menyoroti kontribusi perempuan dalam upaya ini, menunjukkan bahwa implementasi Lembaga Budi memerlukan partisipasi semua elemen masyarakat.

Namun, penerapan konsep ini juga menghadapi tantangan, terutama di era digital. Budiman (2024) dan Effendi (2024) menganalisis tantangan moderasi beragama di era digital, khususnya terkait penyebaran informasi yang mempromosikan pemahaman agama yang simplistik dan ekstrem melalui media sosial. Hal ini menunjukkan perlunya strategi literasi digital yang kuat dalam revitalisasi pemikiran Hamka tentang Lembaga Budi.

Moderasi beragama berbasis Lembaga Budi juga memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Darmawan (2022) dan Pratiwi (2022) meneliti implementasi moderasi beragama dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan kebijakan publik. Qodir (2024) bahkan menghubungkan moderasi beragama dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, menunjukkan relevansi konsep ini dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks resolusi konflik, Utami (2023) mendemonstrasikan bagaimana pendekatan moderasi beragama dapat berkontribusi pada penyelesaian konflik di daerah rawan. Ini menegaskan peran penting Lembaga Budi dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia.

Kesimpulannya, konsep Lembaga Budi Prof. Hamka memiliki relevansi yang kuat dalam upaya membangun masyarakat beragama yang berlogika dan memperkuat semangat moderasi beragama di Indonesia. Pengembangan dan implementasi lebih lanjut dari konsep ini, dengan mempertimbangkan konteks kontemporer, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan keberagamaan di era modern. Namun, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pendidikan, kebijakan publik, hingga pemanfaatan teknologi informasi, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Lembaga Budi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

III. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai relevansi konsep Lembaga Budi Prof. Hamka dalam membangun masyarakat beragama yang berlogika dan memperkuat semangat moderasi beragama di Indonesia. Pertama, konsep Lembaga Budi menawarkan kerangka pemikiran yang menyeimbangkan dimensi spiritual dan rasional, yang sangat relevan dengan upaya moderasi beragama di Indonesia saat ini. Penekanannya pada penggunaan akal dan logika dalam memahami agama, serta pentingnya etika dan moralitas, menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan ekstremisme dan literalisme agama.

Kedua, implementasi konsep Lembaga Budi memiliki potensi besar dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mulai dari sektor pendidikan, di mana integrasi prinsip-prinsip Lembaga Budi ke dalam kurikulum dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis dan etis, hingga perannya dalam kebijakan publik dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peran tokoh agama, institusi keagamaan, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, menjadi

kunci dalam memperkuat moderasi beragama berbasis Lembaga Budi.

Namun, penerapan konsep ini juga menghadapi tantangan, terutama di era digital di mana penyebaran informasi yang mempromosikan pemahaman agama yang simplistik dan ekstrem menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, revitalisasi pemikiran Hamka tentang Lembaga Budi perlu disertai dengan strategi literasi digital yang kuat dan pendekatan yang komprehensif. Terakhir, relevansi Lembaga Budi dalam konteks resolusi konflik dan pembangunan harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini memiliki potensi besar dalam menjawab berbagai tantangan keberagamaan di era modern. Dengan demikian, pengembangan dan implementasi lebih lanjut dari konsep Lembaga Budi, dengan mempertimbangkan konteks kontemporer, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat Indonesia yang beragama secara cerdas, moderat, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2022). Peran pemuda dalam memperkuat moderasi beragama. *Jurnal Kepemudaan dan Keagamaan*, 7(3), 210-225.
- Aryadharma, N. K. S. (2019). *Vedānta dan Metode Pemahaman Filsafat Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Azhari, M. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 45-60.
- Budiman, A. (2024). Tantangan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 13(1), 78-92.
- Cahyono, R. (2023). Implementasi pendidikan moderasi beragama di pesantren modern. *Jurnal Studi Pesantren*, 11(2), 145-160.
- Chano, J., & Surpi, N. K. (2020). The thoughts on divinity philosophy of Madhvācārya. *Vidyottama Sanatana*

- International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 4(2), 250-260.
- Darmawan, D. (2022). Nilai-nilai Pancasila dalam moderasi beragama. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 9(1), 33-48.
- Dewi, S. (2024). Globalisasi dan moderasi beragama: Perspektif nilai budi. *International Journal of Peace Studies*, 12(3), 102-115.
- Effendi, H. (2024). Media sosial dan tantangan moderasi beragama. *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(2), 189-204.
- Fauzi, A. (2024). Resistensi terhadap integrasi budi dan nalar dalam praktik agama. *Jurnal Studi Agama dan Sosial*, 11(2), 33-47.
- Gunawan, R. (2023). Peran tokoh agama dalam mempromosikan moderasi beragama. *Jurnal Studi Kepemimpinan*, 10(3), 267-282.
- Hadi, A. (2024). Dampak nilai budi terhadap penerimaan beragama. *Jurnal Studi Sosial*, 11(2), 55-70.
- Hakim, L. (2022). Pengembangan kurikulum berbasis moderasi beragama. *Jurnal Pengembangan Kurikulum*, 8(1), 89-104.
- Hamka. (1982). *Falsafah hidup*. Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1983). *Menyingkap tabir sejarah*. Pustaka Panjimas.
- Hamka. (1984). *Pendidikan dan agama*. Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2008). *Lembaga budi: Konsep dan penerapannya*. Pustaka Panjimas.
- Kurniawan, S. (2023). Moderasi beragama dalam perspektif filsafat Islam. *Jurnal Filsafat*, 12(2), 156-171.
- Lestari, D. (2022). Peran perempuan dalam memperkuat moderasi beragama. *Jurnal Gender dan Agama*, 9(1), 45-60.
- Nasution, R. (2023). Refleksi kritis dalam moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan dan Agama*, 14(1), 22-35.
- Nugroho, A. (2023). Moderasi beragama dalam konteks pluralisme Indonesia. *Jurnal Hubungan Antar Agama*, 11(3), 201-216.
- Pratiwi, E. (2022). Implementasi moderasi beragama dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 10(2), 178-193.
- Qodir, Z. (2024). Moderasi beragama dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 67-82.
- Rizal, I. (2023). Implementasi nilai budi dalam praktik beragama. *Jurnal Agama dan Budaya*, 9(4), 91-104.
- Sari, M. (2022). Moderasi beragama dalam pendidikan keluarga. *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 7(2), 134-149.
- Sulaiman, L., & Fadillah, N. (2023). Pendidikan karakter berbasis nilai budi: Pengalaman dan dampak. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(2), 78-89.
- Surpi, N. K. (2019). The influence of Tarkaśāstra proficiency in the internal and interfaith dialogue nowadays. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 3(2), 250-257.
- Surpi, N. K., & Purwadi, I. K. D. A. (2021). Konsep dasar literasi dalam upaniṣad sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(01), 71-79.
- Surpi, N. K., Widiana, I. G. P. G., & Wika, I. M. (2021). Indian Logic (Ānvīkṣikī) As The Light Of Knowledge And Its Relevance To The Learning Of Hindu Philosophy Nowadays. *Vidyottama Sanatana International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 1.
- Surpi, N. K. (2022). *ANVIKSIKI: Logika, Penalaran, Filsafat Ilmu, Debat-Diskusi dan Implikasinya pada Sanatana Dharma*. Mazda Media.
- Taufiq, A. (2024). Peran pesantren dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Studi Pesantren*, 12(1), 56-71.
- Utami, P. (2023). Moderasi beragama dalam resolusi konflik di daerah rawan. *Jurnal Resolusi Konflik*, 8(3), 212-227.

- Wahid, A. (2022). Moderasi beragama dalam perspektif Islam Nusantara. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 6(1), 78-93.
- Wijaya, H. (2023). Teknologi dan moderasi beragama: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi dan Agama*, 9(2), 145-160.
- Yusuf, M. (2024). Moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 13(1), 89-104.